

**TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KASUS
PEMENJARAAN PENOLAK DINAS MILITER KOREA SELATAN
(Studi Preskripsi Peran Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa)**



**PENULISAN HUKUM
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan guna Meraih Derajat Sarjana S-1 dalam Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh:
Myra Karlini Bujung
E0013296**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KASUS
PEMENJARAAN PENOLAK DINAS MILITER KOREA SELATAN
(Studi Preskripsi Peran Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa)**

Oleh:

Myra Karlini Bujung
E 0013296

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 4 Mei 2017

Pembimbing I



Ayub Torry Satriyo Kusumo S.H.,M.H.
NIP. 198307162008011005

Pembimbing II



Anugrah Adiastuti S.H.,M.H.
NIP. 198506292009122002

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KASUS PEMENJARAAN
PENOLAK DINAS MILITER KOREA SELATAN
(Studi Preskripsi Peran Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa)**

Oleh:

Myra Karlini Bujung



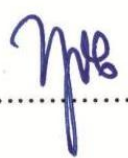
NIM. E 0013296

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret


Pada Hari / Tanggal : Jumat / 26 Mei 2017

DEWAN PENGUJI

1. Siti Muslimah S.H., M.H. : (.....)
NIP. 19700926 199403 2 001
Ketua
2. Anugrah Adiastruti S.H., M.H. : (.....)
NIP. 19850629 200912 2 002
Sekretaris
3. Ayub Torry Satriyo K. S.H., M.H. : (.....)
NIP. 19830716 200801 1 005
Anggota



Mengetahui
Dekan


Prof. Dr. Supanto. S.H., M.Hum.
NIP. 19601107 198601 1 001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Myra Karlini Bujung

NIM : E0013296

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penulisan Hukum (skripsi) yang berjudul **TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KASUS PEMENJARAAN PARA PENOLAK DINAS MILITER KOREA SELATAN (Studi Preskripsi Peran Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa)** merupakan hasil karya murni saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 29 April 2017

g membuat pernyataan



Myra Karlini Bujung
NIM. E0013296

ABSTRAK

Myra Karlini Bujung, E0013296. 2017. TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KASUS PEMENJARAAN PENOLAK DINAS MILITER KOREA SELATAN (Studi Preskripsi Peran Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis apakah tindakan Korea Selatan yang memenjarakan para penolak dinas militer atas dasar hati nurani melanggar ketentuan internasional mengenai perlindungan HAM dalam ICCPR, serta menganalisis peran Komite HAM PBB sebagai badan ahli yang mengawasi pelaksanaan ICCPR dalam mempengaruhi Korea Selatan untuk menyesuaikan tindakannya dengan ketentuan perlindungan HAM dalam ICCPR yang telah diratifikasi oleh Korea Selatan pada tahun 1990.

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber penelitian ini diambil dari bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan atau studi dokumen. Semua bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan metode silogisme menggunakan pola berpikir deduktif.

Hasil penelitian hukum ini memberikan beberapa petunjuk bahwa Korea Selatan melanggar prinsip dalam Pasal 18 ICCPR berupa perlindungan hak kebebasam berpikir, berhati nurani, dan beragama sebagai pasal yang melindungi para penolak dinas militer atas dasar hati nurani. Situasi ini perlu adanya peran Komite HAM PBB dalam mempengaruhi tindakan Korea Selatan untuk memberikan perlindungan HAM bagi mereka yang memiliki keberatan hati nurani terhadap dinas militer. Melalui Keputusannya, Komite perlu memberikan rekomendasi kepada Korea Selatan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakui hak menolak dinas militer atas dasar hati nurani dengan memberikan dinas alternatif bagi mereka.

Kata Kunci : Keberatan hati nurani, Dinas Militer, Korea Selatan, Komite HAM PBB, ICCPR.

ABSTRACT

Myra Karlini Bujung, E0013296. 2017. HUMAN RIGHTS OBSERVATION ON IMPRISONMENT OF SOUTH KOREAN'S MILITARY SERVICE CONSCIENTIOUS OBJECTORS (A Perspective Study on the Role of United Nations Human Rights Committee). Legal Writing. Law Faculty of Sebelas Maret University.

This legal research aims to analyze whether South Korean actions in imprisoning conscientious objection to military service violate the international provisions on human rights protection in the ICCPR, and to analyze the role of the UN Human Rights Committee as an expert body which supervises the implementation of the ICCPR in influencing South Korea to adjust its actions with the provisions of human rights protection in the ICCPR that have been ratified by South Korea in 1990.

The type of this research is a normative legal research that is prescriptive and applied by using the statue approach, cases approach, and conceptual approach. The source of this research is taken from primary and secondary law material by using the technique of collecting legal material of literature study or document study. All the legal material is then analyzed by syllogism method using deduction mindset.

The results of this legal study provide some indication that South Korea violated the principle in Article 18 of the ICCPR in the form of protection of the right to freedom of thought , conscience and religion as the principle protecting conscientious objection to military service. This situation requires the role of the UN Human Rights Committee in influencing South Korea's actions to provide human rights protection for those conscientious objectors to military service. Through its decisions, the Committee needs to make recommendations to South Korea to take the necessary steps to recognize the right to refuse military service on the basis of conscience by providing alternative service to them.

Keywords : Conscientious Objection, Military Service, South Korea, UN Human Rights Committee, ICCPR.

MOTTO

“Teruslah minta, dan itu akan diberikan kepadamu; teruslah cari, dan kamu akan menemukan; teruslah ketuk, dan itu akan dibuka bagimu.”

-Lukas 11:9-

“Karena itu, segala sesuatu yang kamu ingin orang lakukan kepadamu, demikian juga harus kamu lakukan kepada mereka..”

-Matius 7:12-

World may give us pain, sadness, and misery, but there is always hope, which save us like a hero, even in the bleakest moment.”

-Penulis-

If you feel discouraged, encourage others, it will empowering you

-Penulis-

“Kalau rencanamu untuk satu tahun, taburlah benih. Kalau rencanamu untuk sepuluh tahun, tanamlah pohon. Kalau rencanamu untuk seratus tahun, didiklah orang”

-NN-

“Don’t troubles trouble, until trouble troubles you.”

-NN-

Life isn’t about getting and having, it’s about giving and being”

-Kevin Kruse-

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum (Skripsi) ini saya persembahkan kepada:

- Semua saudara-saudaraku seiman di Korea Selatan yang sedang menjalani masa tahanan mereka karena memilih untuk netral dan mempertahankan iman mereka sebagai Saksi-saksi Yehuwa, semoga mereka terus diberi kekuatan dari Allah dalam menjalani masa sulit ini dan dapat bertekun hingga ke akhir;
- Papa dan Mama yang sudah memberikan doa, kasih sayang dan semangat bagi Penulis;
- Keluarga besarku yang tercinta dan selalu menjadi inspirasi Penulis dalam mengenyam pendidikan;
- Almamaterku Universitas Sebelas Maret Surakarta;

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih terdalem Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala berkat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **“TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KASUS PEMENJARAAN PENOLAK DINAS MILITER KOREA SELATAN (Studi Preskripsi Peran Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa)”**. Penulisan hukum ini menjadi satu syarat untuk memperoleh derajat sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya seluruh penulisan hukum atau skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan, baik materiil maupun moril yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan rendah hati Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Supanto S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Dr. Emmy Latifah S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum UNS.
3. Bapak Ayub Torry Satriyo Kusumo S.H.,M.H. dan Ibu Anugrah Adiastruti S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan hukum (skripsi) yang telah menyediakan waktu, arahan serta motivasinya untuk memberikan bimbingan bagi Penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini.
4. Dr. M. Hudi Asrori S S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademis Penulis.
5. Ketua Bagian PPH Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H. beserta seluruh anggota PPH yang banyak membantu Penulis dalam Penulisan Hukum ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada Penulis sehingga dapat

dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini dan semoga Penulis dapat mengamalkannya dalam kehidupan masa depan;

7. Kedua orang tuaku tersayang, Papa dan Mama yang telah mendidik dan melatihku dalam iman dan kebenaran serta tidak pernah lelah memberikan dukungan jasmani dan rohani demi kelancaran Penulis menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
8. Seluruh keluarga besarku, Opa, Oma, Om, Tante dan adik-adikku yang selalu ada saat suka dan duka, yang terus memberikan semangat dan motivasi untuk dapat menyelesaikan tahap pendidikan ini;
9. Sahabat-sahabatku Dian, Ajeng, Anis, Lany, Maulina yang telah mengisi dan memberi arti dan kenangan bermakna selama Penulis kuliah di Fakultas Hukum dan telah saling bantu tanggung beban baik di dalam maupun diluar perkuliahan;
10. Semua teman-teman seperjuangan FH angkatan 2013 lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini telah bersama-sama menjalani pendidikan di kampus ini dan saling membeikan anjuran serta dukungan; dan
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan hukum ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Demikian semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak baik akademisi, praktisi maupun masyarakat umum.

Surakarta, 29 April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Abstrak	v
<i>Abstract</i>	vi
Motto	vii
Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel, Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran	xiv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penelitian.....	11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori.....	13
1. Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa- Bangsa.....	13
2. Kebebasan Beragama (<i>freedom of religion</i>) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	17
3. Penolakan Dinas Militer atas Dasar Hati Nurani	19
a. Kerangka Hukum HAM Internasional.....	21

b. Hak Menolak Dinas Militer	23
c. Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB	29
4. Dinas Militer di Korea Selatan	32
5. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau <i>International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)</i>	34
6. Penolakan Dinas Militer di Korea Selatan	38
B. Kerangka Pemikiran	40
BAB III	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan HAM para Penolak Dinas Militer di Korea Selatan	42
1. Sistem Dinas Militer dan Penolakan Dinas Militer di Korea Selatan	43
2. Situasi Terakhir	46
3. Penjatuhan Hukuman Penjara bagi Para Penolak Dinas Militer di Korea Selatan Melanggar Hak Asasi Manusia	49
B. Peran Komite Hak Asasi Manusia PBB dalam Kasus Pemenjaraan Para Penolak Dinas Militer di Korea Selatan	67
1. Pandangan Komite HAM PBB terhadap Hak Menolak Dinas Militer atas Dasar Hati Nurani	67
2. Peran Komite HAM PBB dalam Kasus Penolakan Dinas Militer Korea Selatan	70
3. Pemberian Dinas Alternatif bagi Para Penolak Dinas Militer dan Rekomendasi Komite HAM PBB	75
BAB IV	
PENUTUP	
A. Simpulan	86
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel

Tabel. 1. Jumlah Para Penolak Dinas Militer Korea Selatan Beberapa Tahun Terakhir	47
Tabel. 2 : Pengakuan Konstitusional Pertama Secara Legislatif Dalam Hal Keberatan Hati Nurani Untuk Dinas Militer	63
Tabel. 3. Negara Anggota PBB yang Menjalankan Sistem Wajib Militer Namun Tidak Mengakui Keberatan Hati Nurani atas Dinas Militer	66
Tabel. 4. Daftar Para Penolak Dinas Militer yang Dipenjarakan Atas Dasar Hati Nurani Mereka—Menurut Lokasi (Hingga bulan April 2017)	67

Gambar

Gambar 1. Negara-negara yang Masih Memenjarakan Para Penolak Dinas Militer atas Dasar Hati Nurani	60
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Komentar Umum Nomor 22 Komite HAM PBB

Lampiran 2 : *HRC Views on Min-Kyu Jeong et al v Republik Korea*
(CCPR/C/101/D/1642-1741/2007)

Lampiran 3 : *HRC Views on Eu-min Jung et al v Republik Korea*
(CCPR/C/98/D/1593-1603/2007)

Lampiran 4 : *HRC Views on Yoon dan Choi v Republik Korea*
(CCPR/C/88/D/1321-1322/2004)